



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## MENJAGA ASA SAWIT RAKYAT

**Lukman Adam**

Peneliti Muda

*lukman.adam@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dalam sebulan terakhir ini belum usai. Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi melalui Permendag No. 11 Tahun 2022, menghimbau dan mengancam pengusaha nakal, membentuk Satgas terkait minyak goreng, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Fokus Pemerintah terlihat pada aspek distribusi dan rantai pasok, belum banyak merambah pada aspek hulu dan manajemen pengelolaan sawit sebagai bahan baku minyak goreng.

Padahal permasalahan manajemen minyak goreng juga ada di produksi. Luas lahan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) hanya mencapai 4%, masyarakat 3%, dan sisanya swasta. Ketimpangan luasan lahan ini menyebabkan pemerintah tidak bisa berbuat banyak di aspek distribusi. Belum lagi pabrik pengolahan *crude palm oil* (CPO) yang banyak dimiliki oleh industri swasta.

Isu lingkungan, moratorium perluasan lahan, dan peremajaan lahan sawit yang lambat, perawatan dan penggunaan pupuk yang belum optimal, merupakan masalah dari aspek produksi. Di tambah lagi penyaluran dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) pada pengusaha mencapai Rp110,32 triliun untuk pengembangan biodiesel. Padahal tujuan dari penghimpunan dana BPDKS dalam Perpres No. 66 Tahun 2018 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan pengembangan sumber daya petani, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, dan peningkatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit sebagai tujuan dari penghimpunan dana BPDKS. Data juga menunjukkan alokasi untuk pekebun hanya mendapat Rp6,8 triliun.

Permasalahan lain yang mengemuka dari penghimpunan dana BPDKS adalah mekanisme penyaluran dana yang cenderung panjang. Mekanisme penyaluran dana BPDKS untuk petani dimulai dari tahapan: 1) menjadi anggota kelompok, 2) penyiapan data untuk pengusulan secara online yang disetujui oleh dinas pertanian kabupaten/kota, 3) persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, 4) penyampaian ke BPDKS untuk mendapatkan rekomendasi teknis, dan 5) penyaluran dana oleh perbankan.

Apabila anggaran BPDKS yang diperoleh pekebun dapat meningkat dan digunakan sesuai tujuan, niscaya kemampuan petani meningkatkan produktivitas akan tercapai, pekebun bisa lebih berbudidaya dengan efisien, dan menerapkan teknologi. Penyederhanaan mekanisme penyaluran dan paradigma pemerintah diperlukan agar tujuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dapat terwujud.

## Atensi DPR

Kegiatan pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, generasi kini dan mendatang. Panja Pengelolaan Sawit Rakyat dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan peraturan pelaksana, seperti Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pembiayaan yang diberikan oleh BPDKS seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya pekebun rakyat. Realokasi anggaran untuk pengembangan sawit harus difokuskan pada sawit rakyat, pembangunan fasilitas pengolahan CPO di daerah, dan penyederhanaan mekanisme penyaluran dana BPDKS untuk masyarakat, serta pendampingan penyuluh pada pekebun agar mampu memenuhi persyaratan.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 11 dan 12 April 2022;  
kontan.co.id., 13 April 2022;  
*Media Indonesia*, 11 April 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S  
Sri Nurhayati Q.  
Rasbin  
Venty Eka Satya  
Rafika Sari

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.